

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa diberlakukannya Otonomi Daerah, untuk pelaksanaannya siap atau tidak siap setiap pemerintah di daerah Kabupaten/Kota harus melaksanakannya, sehingga konsep pembangunan desentralistik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab baik menyangkut pengelolaan keuangan daerah maupun tanggung jawab pengelolaan sumber daya yang tersedia.

Pembangunan daerah sebagai bagian dari integral pembangunan nasional makin mendorong dan meningkatkan stabilitas, pemerataan, pertumbuhan dan pengembangan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi tingkat ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.

Pada hakekatnya ketimpangan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah lebih terasa pada ketimpangan pendapatan, yang sesungguhnya merupakan suatu keadaan dimana distribusi pendapatan di masyarakat menunjukkan keadaan yang tidak merata dan lebih menguntungkan golongan-golongan tertentu. Pada sisi lain ada sekelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan tertentu yang merasa kurang diperhatikan dan cenderung sedikit sekali menikmati hasil-hasil pembangunan.

Perekonomian suatu daerah mengalami pertumbuhan, kondisi ini merupakan gambaran seberapa jauh usaha dalam meningkatkan produksi barang dan jasa. Pendapatan regional adalah besarnya produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah tersebut yang lazim diukur dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam periode tertentu dan biasanya dihitung dalam satu tahun.

Pembangunan pada prinsipnya bertujuan mengubah atau mengganti pola keinginan secara keseluruhan dan dasar pertimbangan penghasilan dengan secara khusus menitik beratkan pada masalah mempercepat target pertumbuhan penghasilan untuk kelompok-kelompok miskin. Kabupaten Lampung Barat mengarahkan pembangunan daerahnya untuk menggali potensi yang tersedia, baik potensi sumber daya alam, maupun sumber daya manusia guna mencapai pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, partisipasi serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Perkembangan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini mengenai Produk Domestik Regional Bruto.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan tahun 2000 di Kabupaten Lampung Barat tahun 2005 – 2011.

Tahun	PDRB (jutaan rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)
2005	7.579.363	-
2006	7.698.301	5,07
2007	7.774.796	4,76
2008	8.189.735	5,04
2009	8.618.452	5,27
2010	9.108.034	5,70
2011	9.629.014	5,73
	Rata-rata	5,26

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Lampung Barat dalam Angka*, 2012 .

Dari tampilan data pada tabel 1 adalah, bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat relative selama lima tahun tren perkembangannya merata rata-rata mencapai 5,26 persen, keadaan ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat terus meningkat dan tidak mengalami fluktuasi yang ekstrim meskipun perkembangan ekonomi regional dan internasional berfluktuasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Lampung Barat tidak terpengaruh langsung dengan gejolak ekonomi diluar Kabupaten ini.

Dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh BPS, penduduk di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2005 berjumlah 1.253.962 jiwa, lalu pada tahun 2008 penduduk di Kabupaten Lampung Barat bertambah sebanyak 17,71 persen atau bertambah sebanyak 222.034 jiwa. Laju pertumbuhan yang tinggi ini pada saat Kabupaten Lampung Barat masih bersatu dengan Kabupaten Lampung utara. Setelah pemisahan pada tahun 2010 jumlah penduduk kabupaten Lampung Barat hanya 912.490 yang bertempat tinggal di 17 kecamatan.

Sejak pemisahan menjadi Kabupaten pemekaran perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2010 berjumlah 932.435 jiwa atau laju pertumbuhan 2,16 persen dan pada tahun 2011 jumlah penduduk 965.184 jiwa atau tumbuh sebesar 3,51 persen saja.

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Barat relative rendah di bandingkan dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten/Kota lainnya di

Provinsi Lampung, pertumbuhan terendah urutan nomor tiga (3) setelah pertumbuhan terendah lainnya.

Tabel 2. Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Barat tahun 2005 – 2011

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
2005	1.253.962	-
2006	1.298.794	3,54
2007	1.381.358	6,36
2008	1.475.996	6,85
2009	912.490	-
2010	932.435	2,16
2011	965.184	3,51

Sumber : Badan Pusat Statistik, *Lampung Barat dalam Angka*, 2012.

Keterangan: *data SUSENAS tahun 2005.

Tabel 3 menunjukkan laju pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Lampung Barat selama Tahun 2005 – 2011. Laju pertumbuhan pendapatan per kapita Kabupaten Lampung Barat masih bergabung dengan Kabupaten pemekaran pada tahun 2010 terus mengalami peningkatan dan hingga tahun 2010 pendapatan perkapita sebesar Rp. 774.675,00 suatu angka yang memberikan gambaran tingkat kesejahteraan yang relative rendah. Akan tetapi sejak tahun 2000 setelah terjadi pemekaran Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Waykanan, Pendapatan perkapita di Kabupaten yang memiliki 17 kecamatan ini menjadi relative naik yaitu sebesar Rp. 839.534,00 suatu angka yang relative lebih baik jika dibandingkan dengan pendapatan perkapita disaat masih bergabung dengan kabupaten-kabupaten induk.

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Penduduk Di Kabupaten Lampung Barat Periode 2005 – 2011.

Tahun	Pendapatan Per Kapita (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2005	796.301	-
2006	810.196	1,74
2007	727.367	-6,14
2008	731.695	0,60
2009	749.936	2,49
2010	774.065	3,22
2011	839.584	3,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Lampung Barat dalam Angka*, 2012.

Secara umum, ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung dapat dilihat melalui tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Distribusi Pendapatan Penduduk Menurut Bank Dunia dan Indeks Gini Provinsi Lampung.

Tahun	40% Rendah	40% Sedang	20% Tinggi	Indeks Gini
2005	23,50	38,06	38,44	0,276
2008	22,80	37,99	39,20	0,288
2011	19,66	44,89	35,45	0,298

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Lampung dalam Angka*, 2008.

Pada tabel 4 di atas, Indeks Gini pada tahun 2005, 2008, dan 2011 menunjukkan angka kurang dari 0,35 itulah sebabnya ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung pada umumnya dikategorikan sebagai ketimpangan pendapatan yang ringan. 40% penduduk dengan pendapatan rendah juga memperlihatkan angka yang cukup memuaskan, yaitu pada tahun 2005 mencapai 23,50% dan bahkan setelah itu yaitu pada tahun 2008 sebesar 22,80%. Sedangkan tahun 2011, 40% penduduk dengan pendapatan rendah berjumlah 19,66%. Dengan melihat perkembangan distribusi pendapatan pada 40% penduduk dengan pendapatan rendah maka dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan dikategorikan sebagai ketimpangan pendapatan yang ringan.

Bila dilihat secara global, negara-negara yang tergolong negara miskin biasanya mengalami ketimpangan pendapatan yang tidak terlalu menonjol. Jadi, hampir dapat dipastikan masyarakatnya memiliki pendapatan yang sama atau tidak jauh berbeda. Hal ini terjadi karena tiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mengusahakan kehidupannya.

Secara teoritis orang menjadi miskin disebabkan karena ruang kapabilitas mereka kecil, bukan karena mereka tidak memiliki barang. Dengan kata lain, orang menjadi miskin karena mereka tidak bisa melakukan sesuatu, bukan karena tidak memiliki sesuatu. Implikasinya, kesejahteraan tercipta bukan karena barang yang kita miliki tetapi karena akses yang memungkinkan kita memiliki barang tersebut. Dari konferensi 55 negara di PBB pada tanggal 20 September 2004, tercatat bahwa kesenjangan antara si kaya dan si miskin telah melebar dalam empat dekade terakhir sejak 1960-an, laporan tersebut menyatakan bahwa mayoritas penduduk dunia tidak bisa memetik manfaat positif dari globalisasi.

B. Permasalahan

Strategi pembangunan Kabupaten Lampung Barat mengutamakan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita maka dengan sendirinya tingkat ketimpangan pendapatan akan berkurang atau lebih jelasnya pertumbuhan ekonomi tersebut akan mengurangi ketimpangan pendapatan dan mampu memperkecil nilai dari Koefisien Gini.

Laju pertumbuhan PDRB dan laju pertumbuhan pendapatan per kapita Kabupaten Lampung Barat pada periode 2005 hingga tahun 2011 menunjukkan peningkatan walaupun masih dapat dikatakan rendah. Hal ini merupakan beberapa kondisi tahap pertumbuhan awal seperti yang dikatakan Prof. Kuznet.

Prof. Kuznet yang telah berjasa besar dalam memelopori analisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju telah mengemukakan bahwa pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik (Todaro, 2000:207).

Ketidak merataan distribusi pendapatan suatu daerah bukanlah merupakan suatu hal yang harus terjadi tetapi merupakan sesuatu hal yang sebenarnya dapat dihindari atau dikurangi.

Atas dasar itulah, penulis mengambil suatu permasalahan sebagai berikut: “Apakah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan diikuti dengan naiknya pendapatan perkapita akan mengurangi ketimpangan pendapatan di Kabupaten Lampung Barat?”

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan.
2. Sebagai sumbang saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam mewujudkan pemerataan pendapatan.

D. Kerangka Pemikiran

Pengertian pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan yang terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses ke arah pengurangan, penghapusan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi yang sedang berkembang (Todaro, 1983:123).

Perkembangan dan proses pertumbuhan ekonomi yang cepat tidaklah secara langsung memberikan jawaban, namun demikian hal ini masih tetap merupakan bahan yang penting dalam program yang nyata yang difokuskan pada kemiskinan, lagi pula pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pemerataan penghasilan yang lebih adil tidak selalu bertentangan atau tidak cocok terhadap tujuan pembangunan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa gejala kemajuan ekonomi mendorong activity ekonomi dan pembangunan, makin tinggi pendapatan masyarakat, makin kecil proporsi penduduk yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan. Akan tetapi perlu juga diingat bahwa disamping tergantung pada pendapatan per kapita, besarnya persentase penduduk di bawah garis kemiskinan tergantung pula corak distribusi pendapatan. Makin merata distribusi pendapatan, maka makin besar persentase penduduk yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan (Sadono Sukirno, 1985:60).

Kebanyakan pengamat ekonomi menyatakan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pendapatan akan sangat timpang pada saat pertumbuhan ekonomi diubah pada waktu yang cepat.

Terdapat adanya pertumbuhan pendapatan di antara kelompok-kelompok yang tingkat pendapatannya berbeda-beda. Artinya, jika kelompok yang satu mengalami peningkatan pendapatan maka posisi yang lain secara relatif akan merosot (Todaro, 2000:220).

Prof. Kuznet yang telah berjasa besar dalam memelopori analisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju telah mengemukakan bahwa pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik. Pada tahap-tahap pertumbuhan awal ini lapangan pekerjaan terbatas, namun tingkat upah dan produktivitas terhitung tinggi. Kesenjangan pendapatan antara sektor industri modern dengan sektor pertanian tradisional pada awalnya akan melebar dengan cepat sebelum pada akhirnya menyempit kembali. Pada tahap ini langkah-langkah transfer pendapatan dan pengeluaran dalam rangka mengurangi kemiskinan belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah sehubungan dengan begitu rendahnya tingkat penghasilan yang ada (Todaro, 2000:207).

Apabila kita menganalisa determinan-determinan yang nyata mengenai pemerataan penghasilan maka yang sangat timpang adalah pemerataan pemilikan kekayaan atau harta yang produktif seperti tanah dan modal dalam segmen-segmen yang berbeda dalam masyarakat, pada umumnya menyebabkan perbedaan penghasilan yang besar sekali antara si kaya dan si miskin.

Pemerataan akan tercapai jika pendapatan terendah dalam masyarakat dinaikkan sedemikian rupa (Bruce Herrick/Charles P Kindleberger, 1988:163).

Prof. Gunar Myrdall berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan yang semakin banyak dan membuat si miskin semakin terhambat. Dampak balik cenderung memperbesar dampak dampak sebar cenderung mengecil. Secara komulatif kecenderungan ini memperbesar ketimpangan regional (M.L. Jhingan, 1999:211).

Menurut Prof. Simon Kuznet, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Todaro, 2000:144).

Menurut Milton. H. Spencer, pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertambahan output nyata atau pendapatan sebuah perekonomian dengan berlangsungnya waktu (Winardi, 1983:183).

Semula banyak ahli berpendapat bahwa proses pembangunan akan mampu menyebarkan hasilnya secara otomatis kepada penduduknya dengan pendapatan yang berlainan tingkat. Mula-mula kelompok-kelompok penduduk berpendapatan tinggi akan memetik hasil pembangunan lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan dengan kelompok penduduk berpenghasilan rendah.

Peningkatan pembangunan memungkinkan pemerataan hasil pembangunan yang lebih luas sehingga menjangkau kelompok penduduk yang berpendapatan rendah.

Perkembangan meluasnya pembagian pendapatan ini dilakukan dengan cara pendistribusian pendapatan, dengan peneteskan ke bawah dari kelompok penduduk yang berpendapatan tinggi atau kaya ke kelompok penduduk berpendapatan rendah atau miskin (Emil Salim, 1983:45).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat merupakan hal yang sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan pemerataan pendapatan merupakan sasaran dan tujuan dari pembangunan ekonomi, sehingga ketimpangan pendapatan yang terjadi dalam masyarakat tidak semakin curam (Winardi, 1983:185).

Dalam perkembangan pembangunan, bagian-bagian pendapatan nasional yang diterima kelompok penduduk berpendapatan tinggi lebih besar dari pada kelompok berpendapatan rendah sehingga terbentang jurang yang semakin melebar, diantara penduduk berpendapatan tinggi dan kelompok penduduk berpendapatan rendah dalam bentuk huruf U yang terlentang horizontal. Apabila tingkat pendapatan semakin naik maka jurang perbedaan antara pendapatan kelompok berpendapatan tinggi pada kaki atas huruf U dengan kelompok berpendapatan rendah pada kaki bawah huruf U ini berangsur-angsur akan lebih baik atau mengecil (Emil Salim, 1983:45).

Ada berbagai metode perhitungan yang dipakai oleh para ahli ekonomi dalam mengukur ketimpangan pendapatan.

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana pada suatu negara dapat diperoleh dengan menghitung rasio

bidang yang terletak antara garis diagonal dan Kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana Kurva Lorenz itu berada. Rasio inilah yang dikenal sebagai rasio konsentrasi Gini (*Gini concentration ratio*) yang sering kali disingkat dengan istilah koefisien Gini (*Gini coefficient*) (Todaro, 2000:187).

E. Hipotesis

Dengan memperhatikan latar belakang dan permasalahan, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran, maka penulis menyusun hipotesis sebagai berikut:

“Diduga menunjukkan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan yang berbentuk U terbalik berlaku di Kabupaten Lampung Barat Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan disarankan agar memprioritaskan daerah yang relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju, memperhatikan aspek pemerataan dengan pemerataan hasil - hasil pembangunan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Lampung Barat.”